IMPEMENTASI PROGRAM BANTUAN JOMPO BADAN AMIL ZAKAT NASIOAN (BAZNAS) DIKECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Administrasi Negara

Oleh :

NAMA : RISA LESTARI
NPM : 220411076

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 11

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : **Risa Lestari**

NPM : 220411076

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Implementasi Program Bantuan Jompo Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Hari/Tgl Ujian : Selasa / 08 September 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sarjan M, S.Sos.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si	Sekretaris / Pembimbing 2	2.
3.	Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Dr. Desriadi, S.Sos.,M.Si	Anggota / Penguji 1	4.
5.	Risvandi, S.Pd.I.,M.Si	Anggota / Penguji 2	5.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL	:	IMPLEMNENTASI PROGRAM BANTUAN JOMPO BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DIKECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NAMA	:	RISA LESTARI
NPM	:	220411076
PROGRAM STUDI	:	ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS	:	ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS	:	ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
RIKA RAMADHANTI, S.Ip., M.Si	**EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si**
NIDN. 1030058402	**NIDN. 1002059002**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

NAMA : RISA LESTARI
NPM : 220411076

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul : **Implementasi Program Bantuan Jompo Baznas Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 27 April 2026



RISA LESTARI
NPM. 220411076

MOTTO

"Setiap langkah membawa kita lebih dekat ke tujuan. Skripsi ini hanyalah langkah kecil yang akan membawa saya ke impian yang sesungguhnya. "

"Pendidikan adalah senjata paling kuat yang bisa digunakan untuk mengubah dunia." - Nelson Mandela

"Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan."

"Keberanian adalah kunci untuk membuka pintu menuju impian." –

"Keinginan kuat adalah kuncinya, keberanian untuk memulai adalah langkah pertama.".

KATA PERSEMBAHAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya menjadikan saya manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani hidup. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal mencapai kesuksesan.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta. Terima kasih yang tiada henti memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat , memberiku semangat sampai saat ini.

Ibu dan bapak dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan dalam memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar kami menjadi lebih baik. Terima kasih banyak jasa kalian sangat berharga untuk kami sebagai mahasiswa.

Dan terima kasih juga kepada teman dan sahabat tersayang tanpa dukungan dari kalian tak akan mungkin aku sampai disini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman seperjuangan. Kalian semua bukan hanya menjadi teman kalian adalah saudara bagiku.

Billahi fi Sabili al-haq, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan, serta keimanan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal penelitian yang berjudul **"IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN JOMPO BADAN AMIL ZAKAT NASONAL DI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI."**

Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi. Dalam kesempatan ini, penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas arahan dan dukungannya.
2. Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, atas dukungan dan motivasinya.
3. Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, yang telah memberikan ilmu, semangat, dan arahan selama proses akademik.
4. Ibu Rika Ramadhanti, SP.,M.SI., selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Bapak Emilia Emharis, S.Sos.,M.SI., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan ilmu, semangat, dan arahan selama proses akademik.
6. Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si., Selaku Dosen Pebimbing Akademik yang telah memberikan bimbingam, masukan, serta motivasi selama proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Terima kasih atas

pengetahuan dan bimbingan yang telah diberikan sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik.

8. Arendri saputra yang senantiasa hadir dan selalu menemani perjalanan penulis hingga saat ini. Terimakasih atas doa serta motivasi yang selalu diberikan dalam setiap kondisi. Kehadiranmu menjadi salah satu sumber semangat bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan setiap proses ini. Terima kasih karena selalu mendengarkan, memahami, dan memberikan dorongan posistif terutama ketika penulis menghadapi kesulitan dan tekanan selama penyusunan skripsi ini.
9. Tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah membantu penulis dalam mengurus surat-surat kepentingan yang diperlukan untuk menyelesaikan penulisan ini.
10. Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Pangean yang telah memberikan izin penelitian, dukungan lapangan, serta membantu penulis dalam menyediakan berbagai data dan informasi yang diperlukan sehingga proses penyusunan proposal ini dapat berjalan dengan lancar.
11. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas dukungan, semangat, dan kebersamaan selama menempuh pendidikan.

Akhir kata dengan sepenuh ketulusan penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Teluk Kuantan, 10 Juni 2026

Penulis

RISA LESTARI
NPM. 220411076

DAFTAR ISI

Halaman

PENGESAHAN SKRIPSI ..... Error! Bookmark not defined.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **i**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..... Error! Bookmark not defined.

MOTTO ..... **iv**

KATA PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xiv**

DAFTAR GAMBAR ..... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

ABSTRAK ..... **xvii**

ABSTRACT ..... **xvii**

BAB 1 PENDAHULUAN ..... Error! Bookmark not defined.

1.1 Latar Belakang ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.2 Rumusan Masalah ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.3 Tujuan Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.4 Manfaat Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.4.1 Manfaat Teoritis ..... **Error! Bookmark not defined.**

1.4.2 Manfaat Praktis ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB II LANDASAN TEORI ..... Error! Bookmark not defined.

2.1 Landasan Teori ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara.....**Error! Bookmark not defined.**

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi.....**Error! Bookmark not defined.**

2.1.3 Teori/Konsep manajemen .....**Error! Bookmark not defined.**

2.1.4 Teori/Konsep kebijakan .....**Error! Bookmark not defined.**

2.1.5 Teori/Konsep implementasi .....**Error! Bookmark not defined.**

2.1.6 Teori/Konsep baznas.....**Error! Bookmark not defined.**

2.1.7 Teori/Konsep Kesejahteraan Sosial .....**Error! Bookmark not defined.**

2.2 Kerangka Pemikiran.....**Error! Bookmark not defined.**

2.3 Hipotesis.....**Error! Bookmark not defined.**

2.4 Definisi Operasional.....**Error! Bookmark not defined.**

2.4.1 Transparansi .....**Error! Bookmark not defined.**

2.4.2 Akuntabilitas .....**Error! Bookmark not defined.**

2.4.3 Kondisional .....**Error! Bookmark not defined.**

2.4.4 Partisipasi .....**Error! Bookmark not defined.**

2.4.5 Responsivitas .....**Error! Bookmark not defined.**

BAB III METODE PENELITIAN.....**Error! Bookmark not defined.**

3.1 Jenis Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

3.2 Informan.....**Error! Bookmark not defined.**

3.3 Sumber Data.....**Error! Bookmark not defined.**

3.3.1 Data Primer .....**Error! Bookmark not defined.**

3.3.2 Data Sekunder .....**Error! Bookmark not defined.**

3.4 Fokus Penelitian .....**Error! Bookmark not defined.**

3.5 Lokasi Penelitian .....**Error! Bookmark not defined.**

3.6 Metode Pengumpulan Data .....**Error! Bookmark not defined.**

3.6.1 Observasi .....**Error! Bookmark not defined.**

3.6.2 Wawancara .....**Error! Bookmark not defined.**

3.6.3 Dokumentasi .....**Error! Bookmark not defined.**

3.6.4 Triangulasi.....**Error! Bookmark not defined.**

3.7 Analisis Data .....**Error! Bookmark not defined.**

3.7.1 *Data Reduction* (Reduksi data) .....**Error! Bookmark not defined.**

3.7.2 *Data Display* (Penyajian Data) .....**Error! Bookmark not defined.**

3.7.3 *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)**Error! Bookmark not defined.**

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian .....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Error! Bookmark not defined.

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian .....**Error! Bookmark not defined.**

4.1.1 Sejarah berdirinya baznas Kabupaten Kuantan Singingi ..... **Error! Bookmark not defined.**

4.1.2 Visi dan Misi Baznas Kabupaten Kuantan Singingi**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL ..... Error! Bookmark not defined.

5.1 Identitas Informan .....**Error! Bookmark not defined.**

5.1.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**Error! Bookmark not defined.**

5.1.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**Error! Bookmark not defined.**

5.1.3 Identitas Informan Berdasarkan Kelompok Usia**Error! Bookmark not defined.**

5.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian Implementasi Program Bantuan Jompo Badan amil zakat Nasional (BAZNAS) di kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi .....**Error! Bookmark not defined.**

5.2.1 Transparansi dalam pengimplementasian program bantuan jompo baznas di kecamatan pangean .....**Error! Bookmark not defined.**

5.2.2 Akuntabilitas dalam pengimplementasian program bantuan jompo baznas di kecamatan pangean .....**Error! Bookmark not defined.**

5.2.3 Kondisional dalam pengimplementasian program bantuan jompo baznas di kecamatan pangean .....**Error! Bookmark not defined.**

5.2.4 Partisipasi dalam pengimplementasian program bantuan jompo baznas di kecamatan pangean .....**Error! Bookmark not defined.**

5.3 Analisa Hasil Penelitian tentang implemntasi program bantuan jompo baznas dikecamatan pangean kabupaten kuantan singingi**Error! Bookmark not defined.**

BAB VI PENUTUP.....Error! Bookmark not defined.

6.1 Kesimpulan .....**Error! Bookmark not defined.**

6.2 Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA.....Error! Bookmark not defined.

LAMPIRAN.....Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

I. 1 : Data Lansia jompo dan penerima bantuan jompo baznas dikecamatan pangean tahun 2024 4

2. 1 : daftar penerima bantuan jompo baznas dikecamatan pangean tahun 2025 5

2. 1 : Operasional variabel implementasi progran bantuan jopo baznas di kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi 5

3. 1 : Informan implementasi progran bantuan jopo baznas di kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi 39

3. 2 : jadwal kegiatan penelitian implementasi progran bantuan jopo baznas di kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi 40

5. 1 : Klasifikasi Responden menurut jenis kelamin 45

5.2 : Klasifikasi Informan menurut tingkat umur..... 48

5.3 : Klasifikasi informan menurut tingkat pendidikan 48

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	:	Daftar Wawancara implementasi progran bantuan jopo baznas di kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi	115
Lampiran 2	:	Dokumentasi Penelitian implementasi progran bantuan jopo baznas di kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi.....127	
Lampiran 3	:	Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 067/Kpts/FIS/UNIKS/X/2022tentang Penunjukan Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.....	131
Lampiran 4	:	Surat Balasan Riset Penelitian implementasi progran bantuan jopo baznas di kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi	132
Lampiran 5	:	Catatan Bimbingan Proposal implementasi progran bantuan jopo baznas di kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi	133
Lampiran 6	:	Catatan Bimbingan Skripsi implementasi progran bantuan jopo baznas di kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi.....	135
Lampiran 7	:	Lembar Persetujuan Pembimbing untuk Revisi Proposal Penelitian.....	137
Lampiran 8	:	Lembar Persetujuan Pembimbing untuk Revisi Skripsi Penelitian	138
Lampiran 9	:	Daftar Riwayat Hidup	139

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN JOMPO BADAN AMIL ZAKAT (BAZNAS) DIKECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

RISA LESTARI
NPM. 220411076

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi Implementasi Program Bantuan Jompo Baznas di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Implementasi Program Bantuan Jompo Baznas Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel menggunakan metode Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang mana jumlah informan pada penelitian ini berjumlah 11 orang. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif, melalui wawancara kemudian Reduksi data, penyanjian data dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat simpulkan bahwa tingkat Implementasi Program Bantuan Jompo Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik. Hal ini dapat di lihat dari hasil Maplemeanasi Progrmn Bantuan Jompo Badan Amil Zakat Nasjonal (BAZiKAS) Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, hanya saja karena keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua lansia jompo dapat terakomodir oleh program bantuan Jompo Baznas ini.

Kata Kunci : Implentasi program bantuan jompo baznas dikecamatan pangean kabupaten kuantan singingi

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE BAZNAS ELDERLY ASSISTANCE PROGRAM IN PANGEAN DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY

RISA LESTARI
NPM. 220411076

This This research was conducted in Pangean District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine how the Baznas Elderly Assistance Program is implemented in Pangean District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in this study is how the Baznas Elderly Assistance Program is implemented in Pangean District, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique used the Purposive Sampling method is a sampling determination technique with certain considerations where the number of informants in this study was 11 people. The data analysis used was qualitative descriptive, through interviews then data reduction, data presentation and then the author drew conclusions. The results of this study can be concluded that the level of implementation of the National Zakat Agency (BAZNAS) Elderly Assistance Program in Pangean District, Kuantan Singingi Regency is good. This can be seen from the results of interviews with informants in the field which show the good implementation of the National Alms Agency (BAZNAS) Elderly Assistance Program in Pangean District, Kuantan Singingi Regency, however, due to budget limitations, not all elderly people can be accommodated by this Baznas Elderly Assistance Program.

Keywords : Implementation of the Baznas Elderly Assistance Program in Pangean District, Kuantan Singingi Regency

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program bantuan jompo yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan wujud nyata dari kepedulian sosial terhadap masyarakat lanjut usia yang tergolong dhuafa. Lansia menjadi kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap persoalan ekonomi, kesehatan, dan sosial, terutama di daerah pedesaan seperti Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam konteks ini, program bantuan jompo menjadi salah satu upaya strategis untuk memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bagi kelompok rentan tersebut.

Kriteria orang jompo merujuk pada individu yang telah memasuki usia lanjut, yaitu berusia 60 tahun ke atas, dan mengalami berbagai penurunan kemampuan fisik, psikologis, maupun sosial. Secara fisik, jompo ditandai dengan melemahnya fungsi tubuh, keterbatasan mobilitas, penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, atau gangguan sendi, serta ketidakmampuan melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan. Dari sisi psikologis, mereka sering mengalami penurunan daya ingat, kebingungan, demensia, atau gangguan emosional seperti depresi dan kesepian. Secara sosial-ekonomi, seseorang dapat dikategorikan jompo apabila tidak memiliki penghasilan, hidup dalam kondisi miskin atau rentan miskin, serta tidak memiliki keluarga yang mampu memberikan dukungan. Dalam aspek kemandirian, jompo mencakup individu yang hanya mampu melakukan aktivitas ringan hingga yang sepenuhnya tidak mandiri dan bergantung pada bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Kriteria jompo yang berhak menerima bantuan Program bantuan jompo BAZNAS ditujukan kepada lanjut usia berusia 60 tahun ke atas yang berada dalam kondisi ekonomi tidak mampu, termasuk kategori fakir dan miskin, tidak memiliki penghasilan tetap, serta tidak memiliki penanggung jawab keluarga yang mampu. Penerima bantuan umumnya mengalami keterbatasan fisik atau kesehatan yang menghambat kemandirian hidup, beragama Islam, dan berdomisili di wilayah pelaksanaan program

Kecamatan Pangean merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki jumlah penduduk lanjut usia cukup tinggi. Berdasarkan perkiraan data tahun 2024, jumlah lansia di kecamatan ini mencapai sekitar 2.150 jiwa . Kondisi demografis ini menuntut perhatian lebih dalam penyediaan layanan sosial, kesehatan, serta dukungan

Berdasarkan data yang diperoleh secara langsung dari Bendahara UPZ Kecamatan Pangean, UPZ Kecamatan Pangean menerima dana bantuan jompo sebesar Rp10.750.000. Dana tersebut diperuntukkan bagi masyarakat lanjut usia yang membutuhkan di wilayah Kecamatan Pangean.

Tabel 1.1 : Data Lansia Jompo dan Penerima Bantuan jompo BAZNAS di Kecamatan Pangean Tahun 2024.

No	Keterangan	Jumlah/Bentuk Bantuan
1	Jumlah lansia (usia ≥ 60 tahun)	2.150 jiwa
2	Penerima Bantuan Jompo Baznas	34 jiwa
3	Bentuk Bantuan yang diberikan	uang tunai Rp.200.000 perbulan

Tabel 1.2 : Daftar penerima bantuan Jompo Baznas di Kecamatan Pangean Tahun 2025.

NO	NAMA	NIK	NO.KK	JK	TEMPAT/TANGGAL LAHIR		UMUR (tahun)	PEKERJAAN	ALAMAT
					TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR			
1	MUKHLIS	1409093112530001	1409091101082942	L	PASARBARU	31 Desember 1953	71	Tidak Bekerja	PASARBARU
2	NURSAM	1409095405590001	1409091405130001	P	PASARBARU	14 Mei 1959	65	Tidak Bekerja	PASARBARU
3	LATIPA	1409097112570001	1409092307240005	P	PASARBARU	31 Desember 1970	54	Tidak Bekerja	PASARBARU
4	YULIANA	1409095010400001	1409090706210001	P	PADANG TANGGUNG	10 Oktober 1940	84	Tidak Bekerja	KOTO
5	IYUSMA MURNI	1409094104500002	1409092105120006	P	KOTO PANGEA	01 April 1950	74	Tidak Bekerja	KOTO
6	BUDIMAN	1409094107470007	1409092312190001	P	PADANG KUNIK	01 Juli 1941	83	Tidak Bekerja	KOTO
7	NIAR	1409094506410001	1409090508110007	P	PULAU KUMPAI	05-06-1941	83	Tidak Bekerja	PULAU KUMPAI
8	OYUSMAWATI	1409094510530001	1409090211200004	P	PULAU KUMPAI	05-10-1953	71	Tidak Bekerja	PULAU KUMPAI
9	SIMA	1409094312420001	1409091905100008	P	PULAU KUMPAI	03-12-1942	82	Tidak Bekerja	PULAU KUMPAI
10	ERMAN	1409090609640001	1409090405110021	L	Pulau Tengah	06 September 1964	60	Tidak Bekerja	PULAU TONGAH
11	SAIT	1409090907380001	1409091101084394	L	Pulau Tengah	01 Februari 1938	87	Tidak Bekerja	PULAU TONGAH
12	SAHARI	1409091301530001	1409091110100013	L	Pulau Tengah	13 Januari 1953	72	Tidak Bekerja	PULAU TONGAH
13	SIDAR	1409094107420013	1409092604220002	P	PULAU DERAS	01 Juli 1942	82	Tidak Bekerja	PULAU DERAS
14	SULAINI	1409094107420015	1409091101084547	P	PULAU DERAS	01 Juli 1942	82	Tidak Bekerja	PULAU DERAS
15	NURMAILIS	1409095002400001	1409090305120008	P	PULAU DERAS	10 Februari 1940	85	Tidak Bekerja	PULAU DERAS
16	YUSMANIAR	1409096105560001	1409092912150001	P	TELUK PAUH	21 Mei 1956	68	Tidak Bekerja	TELUK PAUH
17	IJAT	-	-	L	TELUK PAUH			Tidak Bekerja	TELUK PAUH
18	RAMI'A	1409094712540001	1409090510150001	P	TELUK PAUH	17 Desember 1954	70	Tidak Bekerja	TELUK PAUH
19	MUTIARA	1409094107450417	1409091310200003	P	TANAH BEKALI	01 Juli 1945	79	Tidak Bekerja	TANAH BEKALI
20	SUBAIDAH	1409094107420005	1409092909220001	P	TANAH BEKALI	01 Juli 1942	82	Tidak Bekerja	TANAH BEKALI
21	JALINA	1409094107430412	1409091007080187	P	TANAH BEKALI	01 Juli 1943	81	Tidak Bekerja	TANAH BEKALI
22	SYAMSIDAR	1409094107420019	1409091606100001	P	Padang Tanggung	01-07-1942	82	Tidak Bekerja	PADANG TANGGUNG
23	NURUL AINI	1409095407550001	1409090408150001	P	Padang Tanggung	14-07-1955	69	Tidak Bekerja	PADANG TANGGUNG
24	Nuraini	1409096112480001	1409091007080047	P	Padang Tanggung	21 Desember 1948	76	Tidak Bekerja	PADANG TANGGUNG
25	RAMISA	1409094107450020	1409092808130002	P	PADANG KUNYIT	01 Juli 1945	79	Tidak Bekerja	PADANG KUNIK
26	DARSUNA	1409094102540003	1409092904110004	P	PADANG TANGGUNG	01 Februari 1954	71	Tidak Bekerja	PADANG KUNIK
27	MAYARDI	1409090107530013	1409091101085630	L	PADANG KUNIK	01 Juli 1953	71	Tidak Bekerja	PADANG KUNIK
28	SAMSIDAR	1409094403560001	1409091101085500	P	PEMBATANG	01 Maret 1956	69	Tidak Bekerja	PEMBATANG
29	JARIAH	1409094107520033	1409091101085537	P	PEMBATANG	01 Juli 1952	72	Tidak Bekerja	PEMBATANG
30	JURIA	1409094107470051	1409091101085573	P	PEMBATANG	01 Juli 1947	77	Tidak Bekerja	PEMBATANG
31	RISUN	1409090107460015	1409091101085833	P	PAUH ANGIT	01 Juli 1946	78	Tidak Bekerja	PAUH ANGIT
32	SAMSIDAR	1409094107430004	1409092302210002	P	PAUH ANGIT	01 Juli 1943	81	Tidak Bekerja	PAUH ANGIT
33	SINUAR OTAM	1409094107450032	1409091101085885	P	PAUH ANGIT	01 Juli 1945	79	Tidak Bekerja	PAUH ANGIT
34	HAMIDI	1404130506550001	1409092105240002	L	SUKAPING	05 Juni 1955	69	Tidak Bekerja	SUKAPING
35	SUNA	1409094107490024	1409091101086234	P	SUKAPING	01 Juli 1949	75	Tidak Bekerja	SUKAPING

36	RUHANI	1409094102850001	1409091101086190	P	SUKAPING	01 Februari 1985	40	Tidak Bekerja	SUKAPING
37	MANA	1409090107470039	Tidak Ada KK	P	PULAU RENGAS	07 Januari 1947	78	Tidak Bekerja	Pulau Rengas
38	LIMA .M	1409095210400001	1409091101086354	P	PULAU RENGAS	10 Desember 1940	84	Tidak Bekerja	Pulau Rengas
39	SARIANA	1409094103440001	1409091205110018	P	PULAU RENGAS	03 Januari 1944	81	Tidak Bekerja	Pulau Rengas
40	SUBAIDA	1409094107450014	1409091101086573	P	RAWANG BINJAI	01 Juli 1945	79	Tidak Bekerja	RAWANG BINJAI
41	YULIANA	1471097112450610	1409092112170001	P	PANGEAN	31 Desember 1945	79	Tidak Bekerja	RAWANG BINJAI
42	ALI	1409090107590419	1409090409200005	L	RAWANG BINJAI	01 Juli 1959	65	Tidak Bekerja	RAWANG BINJAI
43	Rukiyah	1409095211580001	1409092011120001	P	SAKO	12 November 1958	66	Tidak Bekerja	SAKO
44	Nurbit			L	SAKO			Tidak Bekerja	SAKO
45	Enan Boru Saragih	1409094506490001	1409090710130008	P	SAKO	15 Juni 1949	75	Tidak Bekerja	SAKO
46	AMRAN	1409092509450001	1409091101082461	L	Pulau Tongah	25 September 1945	79	Tidak Bekerja	SUNGAI LANGSAT
47	NUR HAYATI	1409095202530001	1409092802110007	P	Sentajo	12 Februari 1953	72	Tidak Bekerja	SUNGAI LANGSAT
48	SAINUL	1409090707450001	1409091101086195	L	Perhentian Luas	07 Juli 1945	79	Tidak Bekerja	SUNGAI LANGSAT
49	PIRDAUS	1409090706430001	1409091905200001	L	PAUH ANGIT	07 Juni 1943	81	Tidak Bekerja	PAUH ANGIT HULU
50	MAHODI	1409091708580005	1409091101085706	L	PAUH ANGIT	17 Agustus 1958	66	Tidak Bekerja	PAUH ANGIT HULU
51	SUMA	1409094107520039	1409092704200002	P	PAUH ANGIT	01 Juli 1952	72	Tidak Bekerja	PAUH ANGIT HULU

Sumber : UPZ Kecamatan Pangean 2025

Prosedur penyaluran bantuan jompo dari BAZNAS di Kecamatan Pangean dilakukan melalui pengajuan permohonan ke UPZ Kecamatan atau langsung ke BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dengan memenuhi persyaratan administrasi berupa surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua BAZNAS, fotokopi KTP dan KK, SKTM dari desa atau RT/RW, dan Surat Keterangan fakir. Berkas yang telah lengkap diserahkan ke UPZ untuk diteruskan ke BAZNAS Kabupaten atau dapat disampaikan langsung ke kantor BAZNAS, kemudian dilakukan verifikasi berupa pemeriksaan administrasi, survei lapangan untuk memastikan kondisi ekonomi dan tempat tinggal, serta rapat penetapan kelayakan mustahik.

Penyaluran bantuan jompo oleh BAZNAS umumnya dilaksanakan dengan diantar langsung ke rumah lansia. sehingga proses pembagian, pendataan, dan dokumentasi dapat dilakukan secara lebih efektif. Pemilihan mekanisme

penyaluran biasanya mempertimbangkan kondisi geografis wilayah, jumlah penerima, serta tingkat mobilitas para lansia.

BAZNAS, sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia, memiliki mandat untuk menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kepada delapan golongan penerima (asnaf), termasuk fakir miskin dan kaum lemah seperti lansia dhuafa. Melalui program bantuan jompo, BAZNAS berupaya memastikan bahwa lansia tidak terabaikan dalam sistem kesejahteraan sosial.

Namun, efektivitas implementasi program bantuan jompo di daerah seperti Pangean sering kali menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan dana, kurangnya koordinasi antara BAZNAS kabupaten dan unit kecamatan, serta pendataan penerima manfaat yang belum akurat menjadi faktor penghambat utama. menyebutkan bahwa masih banyak program sosial berbasis zakat yang belum berjalan optimal akibat lemahnya sistem monitoring dan evaluasi. Kondisi tersebut juga terlihat di Pangean, di mana sebagian masyarakat yang tergolong dhuafa belum terjangkau oleh bantuan.

Selain itu, distribusi bantuan di beberapa wilayah belum sepenuhnya berbasis pada data kebutuhan riil masyarakat. Sari dan Prasetyo (2020) menegaskan bahwa kelemahan dalam perencanaan dan pengumpulan data sering menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran zakat konsumtif

Selain masalah pendataan, partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi program masih rendah. Fauzi & Hidayat (2022) menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program zakat. Kurangnya pengawasan dari masyarakat

dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap lembaga pengelola zakat, terutama jika informasi mengenai penyaluran bantuan tidak disampaikan secara terbuka.

Dari sisi pelaksanaan, BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi telah berupaya menyalurkan bantuan secara langsung melalui unit BAZNAS kecamatan bekerja sama dengan aparat desa dan amil zakat lokal. Setiap desa di Kecamatan Pangean, yang berjumlah 17, memiliki daftar prioritas penerima bantuan berdasarkan survei sosial. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua lansia jompo dapat terakomodasi setiap periode penyaluran. Dalam beberapa kasus, bantuan juga mengalami keterlambatan karena proses verifikasi data yang panjang.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan program dan hasil yang diharapkan. Seperti yang dikemukakan oleh Nurhasanah (2019), efektivitas pengelolaan zakat tidak hanya bergantung pada jumlah dana yang dihimpun, tetapi juga pada kemampuan lembaga dalam menerapkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Dalam konteks Pangean, hal ini berarti perlunya strategi yang lebih adaptif dalam menyesuaikan program dengan kondisi sosial-ekonomi lokal.

Penelitian mengenai implementasi program bantuan jompo BAZNAS di Kecamatan Pangean menjadi sangat penting untuk memberikan gambaran empiris tentang sejauh mana kebijakan ini dijalankan secara efektif. Dengan menganalisis proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat keberhasilan program, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Dari perspektif sosial, keberadaan program ini telah memberikan dampak positif terhadap sebagian penerima bantuan. Beberapa lansia penerima manfaat melaporkan peningkatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar serta merasa lebih dihargai secara sosial. Namun, dampak tersebut belum menyentuh seluruh kelompok sasaran, terutama di wilayah desa terpencil. Dengan demikian, efektivitas program perlu terus dievaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata.

Dari sisi pelaksanaan, BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi telah berupaya menyalurkan bantuan secara langsung melalui unit BAZNAS kecamatan bekerja sama dengan aparat desa dan amil zakat lokal. Setiap desa di Kecamatan Pangean, yang berjumlah 17, memiliki daftar prioritas penerima bantuan berdasarkan survei sosial. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua lansia jompo dapat terakomodasi setiap periode penyaluran. Dalam beberapa kasus, bantuan juga mengalami keterlambatan karena proses verifikasi data yang panjang.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan program dan hasil yang diharapkan. Seperti yang dikemukakan oleh Nurhasanah, 2019, efektivitas pengelolaan zakat tidak hanya bergantung pada jumlah dana yang dihimpun, tetapi juga pada kemampuan lembaga dalam menerapkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Dalam konteks Pangean, hal ini berarti perlunya strategi yang lebih adaptif dalam menyesuaikan program dengan kondisi sosial-ekonomi lokal.

Penelitian mengenai implementasi program bantuan jompo BAZNAS di Kecamatan Pangean menjadi sangat penting untuk memberikan gambaran empiris tentang sejauh mana kebijakan ini dijalankan secara efektif. Dengan menganalisis proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat keberhasilan program, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Dari perspektif sosial, keberadaan program ini telah memberikan dampak positif terhadap sebagian penerima bantuan. Beberapa lansia penerima manfaat melaporkan peningkatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar serta merasa lebih dihargai secara sosial. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : **Bagaimana Implementasi Program Bantuan Jompo Badan Amil Zakat Nasional Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan *Universal Health Coverage* (UHC) di Puskesmas Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi Program Bantuan Jompo BAZNAS di Kecamatan Pangean.

1.4 Manfaat Penelitian

manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Penelitian ini memperluas pemahaman ilmiah mengenai implementasi kebijakan sosial, khususnya program bantuan jompo yang dilaksanakan di tingkat kecamatan.

1.4.1.2 Penelitian ini memperkaya penerapan teori-teori implementasi kebijakan seperti Edwards III, Van Meter & Van Horn, serta Grindle melalui analisis empiris yang menunjukkan faktor pendukung dan penghambat di lapangan.

1.4.1.3 Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain dalam mengembangkan kajian serupa, baik untuk penelitian tentang kebijakan sosial berbasis zakat maupun implementasi program kesejahteraan lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis.

1.4.2.1 Bagi Penulis Hasil penelitian ini diharapkan dapat manfaat berupa tambahan pengetahuan dan wawawan kepada penulis berkaitan dengan bagaimana program bantuan jompo baznas Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.2.2 Bagi Instansi Penelitian ini memberikan masukan dan evaluasi objektif terhadap pelaksanaan program bantuan jompo yang mereka kelola. Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan program, bahan refleksi kelembagaan, serta dasar perbaikan ke depan dalam hal validitas data penerima, efektivitas distribusi, pengawasan, dan sistem pelaporan. Penelitian ini juga dapat membantu BAZNAS dalam merancang indikator kinerja baru yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan penerima manfaat

1.4.2.3 Bagi Akademis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dijadikan sebagai bahan referensi ataupun sebagai data pembanding sesuai dengan bidang yang akan diteliti. Memberikan sumbangan pemikiran, menambah wawawan pengetahuan, serta memberikan bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai bagaimana proses implementasi program bantuan jompo baznas dikecamatan pangean.

1.4.2.4 Bagi Masyarakat Penerima Manfaat Secara tidak langsung, penelitian ini dapat membantu menyuarakan aspirasi dan kebutuhan para jompo yang sering kali tidak terdengar dalam perumusan kebijakan. Melalui data dan temuan empiris, masyarakat miskin lansia memperoleh ruang representasi dalam narasi pembangunan sosial berbasis zakat. Diharapkan, hasil penelitian ini akan berkontribusi pada perbaikan layanan sosial bagi mereka di masa mendatang.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Konsep/Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Menurut Waldo (Muhammad, 2019) mendefenisikan administrasi negara sebagai organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, administrasi negara merupakan seni dan ilmu manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan negara.

Dari pengertian administrasi tersebut, dapat dipahami bahwa administrasi publik merupakan konsep yang berhubungan dengan lingkungan pemerintah, karena perlu didukung dengan ilmu pengetahuan *(sience)* dan berbagai teknik serta prinsip manajemen sehingga seorang administrator dapat menjalankan tugasnya, untuk merealisasikan rencana-rencana melalui proses kerja sama untuk mencapai tujuan.

Oleh sebab itu, sebagai suatu ilmu yang diperoleh dari kedua ilmu pengetahuan ini, administrasi negara mengkehendaki dua macam syarat jika hendak dipahami. Pertama, perlu mengetahui sesuatu mengenai administrasi umum. Kedua, harus diakui bahwa banyak masalah administrasi negara timbul dalang kerangka politik. Selanjutnya Dimock dan Dimock menambahkan bahwa administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari apa yang di kehendaki rakyat melalui pemerintahan, dan cara mereka memperolehnya. Oleh karena itu ilmu administrasi negara tidak hanya mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga bagaimana melakukannya.

Menurut Prajudi Atmosudirjo dalam (Rahman, 2017) mengatakan bahwa administrasi adalah fungsi bantuan penyelenggaraan dari pemerintah artinya pemerintah (pejabat) tidak dapat menunaikan tugas-tugas kewajiban tanpa administrasi negara.

Salah satu tugas dari administrasi publik adalah pembuat kebijakan atau *policy maker* yang dikenal dengan kebijakan publik. Artinya para administrator ini membuat suatu kebijakan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di publik (masyarakat). Defenisi administrasi publik terbagi atas dua yaitu : 1. Arti sempit, administrasi negara sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah eksekutif. 2. Arti luas, administrasi negara yang dilakukan oleh ketiga cabang pemerintahan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, (dalam Ummar Congge, 2017).

Administrasi negara/administrasi publik adalah seluruh tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang meliputi : administrasi sipil, adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh departemen dan non departemen mulai dari kegiatan kelurahan sampai dengan kegiatan MPR (Majelis Permusyarawatan Rakyat), administrasi militer, adalah seluruh kegiatan yang dilakukan/diselengarakan oleh angkatan bersenjata (dalam Mariati Rahman, 2017).

Max Weber memperkenalkan teori birokrasi yang menjadi dasar administrasi publik modern. Menurut Weber, birokrasi yang ideal harus memiliki struktur hierarkis, pembagian kerja yang jelas, aturan tertulis, dan profesionalisme aparatur. (Siagian, 2021). Model birokrasi Weber dianggap mampu menciptakan

ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, birokrasi Weber juga dikritik karena dianggap terlalu kaku, lamban, dan kurang responsif terhadap perubahan masyarakat. Kritik terhadap model ini kemudian memunculkan pemikiran bahwa administrasi negara harus adaptif dan partisipatif. Menurut (Sedarmayanti, 2021), birokrasi di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh budaya patrimonial sehingga sulit menerapkan model Weber secara murni.

Woodrow Wilson mengemukakan pentingnya pemisahan antara politik dan administrasi. Menurutnya, politik menentukan kebijakan, sedangkan administrasi mengimplementasikan kebijakan tersebut secara netral dan profesional. Meskipun teori ini dikritik karena terlalu menyederhanakan hubungan antara politik dan administrasi, pemikiran ini tetap menjadi fondasi penting dalam kajian administrasi negara. (Tangkilisan, 2020).

New Public Management (selanjutnya disingkat NPM) muncul pada era 1980-an sebagai kritik terhadap birokrasi tradisional yang dianggap terlalu lambat dan tidak efisien. Osborne dan Gaebler menyatakan bahwa sektor publik perlu menerapkan prinsip manajemen sektor swasta seperti efisiensi, orientasi hasil, dan kompetisi. NPM menekankan pentingnya kinerja, privatisasi, dan desentralisasi dalam administrasi negara. (Sedarmayanti, 2021).

Meskipun NPM mampu meningkatkan efisiensi, pendekatan ini dikritik karena terlalu berorientasi pada pasar dan mengabaikan aspek demokrasi. Denhardt menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh dipandang sebagai komoditas, melainkan sebagai hak warga negara. Kritik ini menjadi dasar munculnya paradigma baru dalam administrasi negara. (Pasolong, 2020).

New Public Service (selanjutnya disingkat NPS) merupakan paradigma baru administrasi negara yang menekankan pelayanan kepada warga negara, bukan kepada pelanggan. Menurut Denhardt administrasi negara harus berfokus pada partisipasi publik, nilai demokrasi, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam paradigma ini, aparatur negara berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai penguasa. (Pasolong, 2020).

Konsep NPS menekankan bahwa tujuan utama administrasi negara adalah melayani kepentingan publik secara adil, bukan mengejar efisiensi ekonomi semata. Dalam konteks Indonesia, penerapan NPS terlihat pada program pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (selanjutnya disingkat Musrenbang). Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dari model birokrasi tradisional menuju *governance* partisipatif.

Governance merupakan konsep yang lebih luas daripada pemerintahan *(government*). Menurut UNDP, *governance* adalah proses pengambilan keputusan dan implementasinya yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. *Governance* menekankan kerja sama antaraktor dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Tangkilisan, 2020).

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi

Menurut Sondang P Siagian (dalam Arie Ambarwati, 2018) setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara firmal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah di tentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang/sekelompok orang yang disebut dengan bawahan.

Menurut Robbins dan Judge (dalam Mardiana Yusuf & Darman Syarif, 2018) perilaku organisasi *(organizational behavior)* merupakan sebuah bidang studi yang menginvestasi pengaruh individu, kelompok dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi, untuk tujuan penerapan pengetahuan demi peningkatan efektivitas organisasi. Perilaku organisasi adalah sebuah bidang studi, yang memplajari tiga penentu perilaku dalam organisasi, yaitu individu, kelompok, dan struktur. Selain itu perilaku organisasi menerapkan pengetahuan yang diperoleh mengenai individu, kelompo, dan efek dari struktur terhadap perilaku untuk membuat organisasi bekerja dengan lebih efektif.

Menurut Prajudi Armosudiro (dalam Arie Ambarwati, 2018) mengatakan organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan definisinya organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana organisasi merupakan tempat orang-orang berkumpul bekerjasama, sama secara rasional sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya (uang,nmaterial, mesin, metode, lingkungan) sarana-prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi (dalam Haruni Ode, 2019).

Menurut Erni dan Kurniawan (dalam Titin Endrawati, 2023) organisasi sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama.

Organisasi merupakan sistem kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu melalui pembagian tugas dan koordinasi kegiatan. (Handoko, 2022). Pembagian kerja yang jelas dan mekanisme koordinasi yang baik, organisasi tidak akan mampu berfungsi secara efektif. Pandangan ini memperkuat gagasan bahwa koordinasi dan komunikasi merupakan elemen utama dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi dan fleksibilitas organisasi.

Organisasi yang efektif harus dipahami sebagai sistem terbuka yang berinteraksi secara aktif dengan lingkungannya. Keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan eksternal, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun teknologi. Dalam era disrupsi digital, kemampuan organisasi untuk berinovasi menjadi kunci dalam mempertahankan relevansi dan daya saing. (Sedarmayanti, 2023).

Konsep *collaborative governance* dalam teori organisasi publik, organisasi modern tidak lagi dapat berjalan secara hierarkis dan kaku, melainkan harus mengedepankan kolaborasi antaraktor, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil. Model organisasi semacam ini menekankan pentingnya partisipasi, transparansi, dan kepercayaan dalam proses pengambilan keputusan. (Wibowo, 2023).

Selanjutnya, Setiawan menggabungkan berbagai pendekatan teori organisasi klasik dan modern dalam satu kerangka berpikir yang disebut teori organisasi kontemporer. Menurutnya, organisasi modern harus mampu menyeimbangkan antara efisiensi struktural dan legitimasi sosial agar dapat bertahan dalam lingkungan yang kompleks. Organisasi tidak hanya dituntut efisien dalam

operasional, tetapi juga harus memiliki kepekaan sosial terhadap tuntutan dan ekspektasi publik. (Setiawan, 2025).

2.1.3 Teori/Konsep Manajemen

Manajemen sumber daya manusia *(human resource management)* adalah proses untuk memperoleh, menelitih, mnilai dan mengompensasi karyawan, dan untuk mengurus relasi tenaga kerja mereka, kesehatan dan keselamatan mereka serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan menurut Gary Dessler (dalam Saihudin, 2019).

Menurut Invancevich (dalam Saihudin, 2019). mendefenisikan manajemen sumber daya manusia sebagai sebuah fungsi yang dijalankan dalam organisasi dengan maksud memfasilitasi pendayagunaan manusia (karyawan) secara paling efektif untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi dan individu.

Flippo (dalam Saihudin, 2019) mendefenisikan manajemen personalia *(personel management)* sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas fungsi pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja agar tujuan-tujuan individu organisasi, dan masyarakat dapat dicapai ia membagi fungsi-fungsi manajemen personalia kedalam fungsi manajerial dan fungsi operasional. Empat fungsi yang pertama (perencanaan samapai dengan pengawasan) adalah fungsi manajerial dan sisanya adalah fungsi operasional manajemen personalia.

Dari defenisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses untuk memperoleh, melatih, menilai dan mengompensasi karyawan, dan untuk mengurus relasi tenaga kerja mereka,

kesehatan dan keselamatan mereka serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi atau individu.

Manajemen sumber daya manusia (selanjutnya disingkat MSDM) adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan *(goal)* bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia - bukan mesin – dan bukan semata mnjadi sumber daya bisnis (dalam Ni Wayan Dian Irmayani, 2021).

Sedangkan T. Hani Handoko (dalam Gusti Ketut Purnaya, 2016). mendefenisikan manajemen sumber daya manusia sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian,pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat.

Secara etimologis *management* (di Indonesia diterjemahkan sebagai "manajemen") berasal dari kata *"manus"* (tangan) dan *"agere"* (melakukan), yang di gabung menjadi kata *"manage"* (Bahasa Inggris) bearti mengurus atau *"managiere"* (Bahasa latin) berarti melatih. (Andri & Siregar, 2021).

Manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya,

memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan. (Terry & George, 2018).

2.1.4 Teori/Konsep Kebijakan

Thomas R. Dye (2017) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah keseluruhan tindakan nyata yang dilakukan pemerintah, alasan atau tujuan yang mendasari tindakan tersebut, serta dampak atau perubahan yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Pengertian ini menekankan bahwa kebijakan publik tidak terbatas pada pernyataan atau rencana, tetapi mencakup keputusan, program, regulasi, dan aktivitas pemerintah yang dapat diamati secara langsung. Selain itu, Dye menegaskan bahwa setiap kebijakan memiliki motivasi tertentu—baik untuk menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan publik, maupun mencapai tujuan politik—dan harus diukur berdasarkan pengaruhnya terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga efektivitas dan manfaatnya dapat dinilai secara jelas.

ames Lester dan Robert Stewart (2020) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu proses atau serangkaian tindakan dan pola keputusan pemerintah yang secara khusus dirancang untuk mengatasi suatu permasalahan publik, baik yang benar-benar nyata maupun yang hanya dipersepsikan ada oleh masyarakat atau pemerintah. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik bukanlah keputusan tunggal yang berdiri sendiri, melainkan kumpulan aktivitas yang saling berurutan dan saling terkait, mulai dari perumusan masalah, penyusunan alternatif solusi, pengambilan keputusan resmi, hingga implementasi dan evaluasi terhadap hasil yang dicapai.

Steven A. Peterson, (2020) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi suatu masalah publik. Definisi ini termasuk dalam kerangka *policy sciences* yang menjelaskan bahwa keberadaan pemerintah tidak hanya sebagai pembuat aturan, tetapi sebagai aktor yang secara aktif mengambil langkah-langkah nyata (actions) untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Peterson, esensi kebijakan publik terletak pada tindakan (*action*), bukan semata pada rencana, peraturan tertulis, atau wacana kebijakan. Artinya, kebijakan dianggap ada dan berfungsi ketika pemerintah benar-benar menjalankannya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, suatu kebijakan yang hanya dirumuskan tanpa implementasi tidak dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik yang efektif.

2.1.5 Teori/Konsep Implementasi

Hill & Hupe, (2019) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah proses kompleks yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan dan organisasi. Mereka menjelaskan bahwa implementasi tidak hanya sekadar menjalankan aturan atau prosedur, tetapi merupakan sebuah *operational governance*, yaitu proses pengaturan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan secara terpadu di lapangan.

Menurut pandangan mereka, dalam kenyataannya kebijakan tidak pernah dilaksanakan oleh satu aktor atau satu tingkat organisasi saja. Implementasi selalu melibatkan interaksi multi-level—dimulai dari perumus kebijakan, instansi yang mengatur pelaksanaan, hingga pihak pelaksana yang berinteraksi langsung dengan

masyarakat. Karena itu, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap level itu berfungsi, berkomunikasi, dan berkoordinasi.

Winter, (2017) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses terintegrasi yang terjadi melalui interaksi dinamis antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan kelompok sasaran. Ia menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh dua faktor besar, yaitu perilaku pelaksana dan respons masyarakat. *Perilaku pelaksana (implementor behavior)* berkaitan dengan sikap, motivasi, kemampuan teknis, pemahaman terhadap tujuan kebijakan, serta persepsi mereka terhadap tugas yang dijalankan; pelaksana yang memiliki kompetensi tinggi dan memahami orientasi kebijakan akan memberikan layanan yang lebih efektif. Sementara itu, *respons masyarakat (target group behavior)* menegaskan bahwa kelompok sasaran tidak hanya menjadi objek, tetapi juga berperan aktif dalam menentukan kualitas hasil kebijakan, di mana tingkat partisipasi, kepatuhan, kebutuhan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat memperkuat atau melemahkan pencapaian program. Winter menegaskan bahwa implementasi tidak dapat dinilai hanya dari struktur kebijakan atau kinerja pelaksana saja, melainkan harus dipahami sebagai hasil interaksi antara pembuat kebijakan, implementor, dan masyarakat; kegagalan pada salah satu unsur akan berdampak langsung pada efektivitas keseluruhan proses implementasi.

Saetren, (2020) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada era modern tidak lagi dipandang sebagai proses linear yang dimulai dari perumusan hingga pelaksanaan, tetapi sebagai proses adaptif yang terus berkembang

mengikuti perubahan kondisi sosial dan kelembagaan. Ia menegaskan bahwa setelah kebijakan diterapkan, pelaksana di lapangan selalu menghadapi situasi baru, keterbatasan sumber daya, dan dinamika kebutuhan masyarakat, sehingga implementasi harus melalui *penyesuaian berulang (iterative adjustments)*. Penyesuaian ini memungkinkan pelaksana untuk memodifikasi strategi kerja, metode pelayanan, atau alokasi sumber daya agar tetap relevan dengan kondisi aktual. Selain itu, Saetren menekankan pentingnya *pembelajaran organisasi (organizational learning)*, yaitu kemampuan lembaga atau unit pelaksana untuk mengevaluasi pengalaman, mengidentifikasi hambatan, dan mengembangkan solusi yang lebih efektif. Implementasi yang kuat adalah implementasi yang mampu berkembang dari kesalahan, menciptakan inovasi, dan meningkatkan efisiensi layanan melalui proses belajar yang berkelanjutan. Ia juga menyoroti bahwa *konteks lokal* merupakan faktor penentu utama, karena setiap kebijakan akan mendapatkan hasil berbeda ketika diterapkan pada lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda. Kondisi masyarakat, nilai lokal, kapasitas komunitas, serta masalah yang dihadapi masyarakat setempat harus menjadi pertimbangan dalam setiap tindakan pelaksanaan. Dengan demikian, teori ini memandang fleksibilitas, adaptasi, dan kemampuan belajar sebagai elemen fundamental dalam keberhasilan implementasi kebijakan modern, sekaligus menjelaskan mengapa kebijakan yang sama dapat memberikan hasil berbeda di lokasi yang berbeda.

Sinambela (dalam Junaedi di Karso, 2021 : 51-52) mengemukakan indikator-indikator yang digunakan antara lain:

1 Transparansi, yaitu menggambarkan keterbukaan dalam penyampaian informasi program kepada Masyarakat.
2 Akuntabilitas, yaitu seluruh kegiatan dalam pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, mulai dari perencanaan, penyaluran hingga pelaporan.
3 Kondisional, yaitu implementasi program disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan, kemampuan pelaksana, serta kebutuhan penerima manfaat.
4 Partisipasi, yaitu pelaksanaan program melibatkan kontribusi dan peran aktif masyarakat, terutama dalam memberikan informasi, masukan, maupun dukungan sehingga implementasi dapat berjalan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

2.1.6 Teori/Konsep Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang dibentuk oleh negara sebagai otoritas resmi pengelolaan zakat. Keberadaan BAZNAS secara legal formal ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan bahwa BAZNAS bertugas untuk menghimpun, mengelola, menyalurkan, dan melaporkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara nasional. Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan penuh kepada BAZNAS sebagai lembaga negara untuk menyelenggarakan pengelolaan zakat secara terstandarisasi dan profesional.

Secara kelembagaan, BAZNAS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama, sehingga menempatkan BAZNAS sebagai institusi strategis dalam kebijakan kesejahteraan sosial berbasis agama. BAZNAS lahir sebagai upaya pemerintah untuk menyatukan berbagai praktik pengelolaan zakat yang sebelumnya dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat secara individual, sehingga dapat menjalankan fungsi penghimpunan dan pendistribusian zakat secara lebih terkoordinasi, efektif, akuntabel, dan merata.

Dukungan teori dari para ahli zakat modern semakin memperkuat posisi BAZNAS sebagai lembaga amil zakat yang profesional. Yusuf Qardhawi, (2018) dalam Fiqh al-Zakat menjelaskan bahwa pengelolaan zakat yang efektif harus dilakukan oleh lembaga resmi yang memiliki struktur organisasi yang kuat, akuntabilitas jelas, dan sistem pendistribusian yang profesional. Menurut Qardhawi, kegiatan zakat tidak cukup dikelola secara individual, tetapi membutuhkan lembaga formal yang dapat memastikan zakat didistribusikan secara optimal kepada kelompok yang paling membutuhkan. Teori Qardhawi ini memberikan dasar konseptual bahwa keberadaan BAZNAS merupakan bentuk implementasi fiqh zakat modern yang mengutamakan efektivitas dan pemerataan distribusi zakat.

Pandangan lain disampaikan oleh Hafidhuddin, (2022) dalam Manajemen Zakat Modern, yang menyebutkan bahwa lembaga zakat tingkat nasional seperti BAZNAS memiliki peran penting dalam memaksimalkan potensi zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat. Hafidhuddin menekankan bahwa zakat harus tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan jangka pendek, tetapi juga

dapat diarahkan untuk pemberdayaan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki struktur dari pusat hingga daerah adalah wujud nyata dari sistem zakat yang modern, terintegrasi, dan berorientasi pada kesejahteraan mustahik.

Dari perspektif tata kelola, Zakat Core Principles(ZCP) - IFSB & BAZNAS, (2018) menegaskan bahwa lembaga zakat nasional seperti BAZNAS harus berpedoman pada prinsip: Good governance, Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas distribusi dan Kepatuhan syariah.

Pedoman ini menjadi teori modern yang menegaskan pentingnya kualitas lembaga zakat untuk memastikan zakat dapat menjadi instrumen sosial yang efektif.

Dalam konteks Program Bantuan Jompo, BAZNAS berperan menyalurkan dana zakat kepada golongan fakir, miskin, dan kelompok rentan, termasuk lansia tidak mampu. Program bantuan jompo ini termasuk pendistribusian zakat kategori konsumtif, yakni bantuan langsung berupa kebutuhan dasar, kesehatan, transportasi, atau pemenuhan kesejahteraan minimum. Program ini juga sejalan dengan tujuan zakat dalam Islam yang berorientasi pada pemberdayaan dan perlindungan sosial.

Dengan struktur BAZNAS yang hadir di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kecamatan, penyaluran bantuan jompo dapat dilakukan secara tepat sasaran berdasarkan kondisi sosial ekonomi lokal. Di Kecamatan Pangean, BAZNAS memiliki peran penting dalam memastikan bahwa lansia yang masuk kategori

mustahik mendapatkan bantuan secara merata, transparan, dan sesuai ketentuan syariah.

2.1.7 Teori/Konsep Kesejahteraan Sosial

Teori kesejahteraan sosial merupakan landasan penting dalam memahami berbagai bentuk intervensi pemerintah dan lembaga sosial dalam menangani kemiskinan, ketidakberdayaan, serta kerentanan kelompok tertentu. Dalam konteks penelitian ini, teori kesejahteraan sosial menjadi dasar mengapa program bantuan jompo perlu ada dan bagaimana program tersebut seharusnya diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar lansia.

Kesejahteraan sosial merujuk pada suatu kondisi di mana individu mampu memenuhi kebutuhan dasar fisik, ekonomi, dan sosialnya sehingga dapat menjalani kehidupan yang layak. Menurut Suharto, E. (2019), kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan.

Dalam konteks lansia jompo, kesejahteraan sosial berarti terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, rasa aman, serta dukungan sosial.
Teori Kesejahteraan Sosial Modern merupakan salah satu fondasi utama dalam kajian kebijakan sosial, program perlindungan sosial, dan program pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam konteks pelayanan dan bantuan bagi kelompok rentan seperti lansia atau jompo. Teori ini berkembang dari pemikiran bahwa kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab negara semata, tetapi juga lembaga masyarakat seperti organisasi non-pemerintah, lembaga keagamaan, dan lembaga filantropi, termasuk BAZNAS sebagai lembaga amil zakat nasional.

Menurut Midgley, (2019), kesejahteraan sosial dipahami sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis, sehingga individu dapat menjalani kehidupan yang produktif, bermartabat, dan layak. Midgley menekankan bahwa program kesejahteraan modern harus berorientasi pada social development, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan pembangunan sosial dan ekonomi sekaligus, serta memastikan kelompok rentan mendapatkan dukungan yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Sementara itu, Gilbert & Terrell, (2020) menjelaskan kesejahteraan sosial sebagai bentuk intervensi sosial yang dirancang untuk mengurangi masalah sosial, ketidaksetaraan, dan kerentanan yang dialami oleh masyarakat. Mereka menekankan bahwa kebijakan sosial modern harus memiliki empat dimensi analisis utama, yaitu:

Basis Kebutuhan – siapa yang berhak menerima bantuan.

Bentuk Pengeluaran – berupa barang, uang, atau layanan sosial.

Strategi Pemberian – universal atau selektif.

Pendanaan – sumber pembiayaan, termasuk zakat dan dana sosial keagamaan.

Pemikiran ini sangat relevan untuk memahami bagaimana lembaga seperti BAZNAS merancang dan menyalurkan program bantuan jompo, karena BAZNAS harus menentukan siapa yang masuk kategori mustahik, bentuk bantuan yang diberikan, serta mekanisme pendistribusian yang tepat dan berkeadilan.

Spicker, (2020) menegaskan bahwa kesejahteraan sosial modern mencakup aspek yang luas, bukan hanya ekonomi, tetapi juga pemenuhan kebutuhan sosial,

jaminan dasar hidup, keamanan sosial, serta pemberian tempat tinggal yang layak bagi kelompok rentan. Ia menekankan bahwa lansia termasuk kategori sosial yang membutuhkan perlindungan khusus, mengingat keterbatasan mereka baik secara fisik maupun ekonomi. Oleh karena itu, teori kesejahteraan sosial modern mengharuskan adanya intervensi yang komprehensif dari lembaga sosial untuk menjamin kelangsungan hidup lansia.

2.1.8 Teori/Konsep Kriteria Orang Jompo

Orang jompo atau lanjut usia (lansia) adalah individu yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas dan mengalami berbagai penurunan kemampuan fisik, psikologis, serta sosial-ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat kemandiriannya. Secara fisik, lansia mengalami melemahnya fungsi tubuh, keterbatasan mobilitas, serta peningkatan risiko penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan sendi. Dari sisi psikologis, lansia sering menghadapi penurunan daya ingat, kebingungan, depresi, dan rasa kesepian akibat kehilangan pasangan atau keterasingan sosial. Sementara dari aspek sosial-ekonomi, banyak lansia yang hidup dalam kemiskinan, tidak memiliki penghasilan, dan bergantung pada bantuan keluarga atau lembaga sosial. Oleh karena itu, mereka termasuk kelompok rentan yang memerlukan dukungan melalui program kesejahteraan sosial. (Nurasiah, 2022).

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu penjelasan terhadap hal-hal yang akan menjadi objek yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka. Kerangka berfikir adalah hasil pemikiran peneliti berdasarkan teori yang ada tentang variabel yang

diteliti dan dirumuskan dari masalah penelitian Sugiyono, (2016) untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan masalah penelitian, maka dibuatlah kerangka berfikir sebagai berikut :

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran Penelitian Implementasi Program Bantuan Jompo Baznas di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

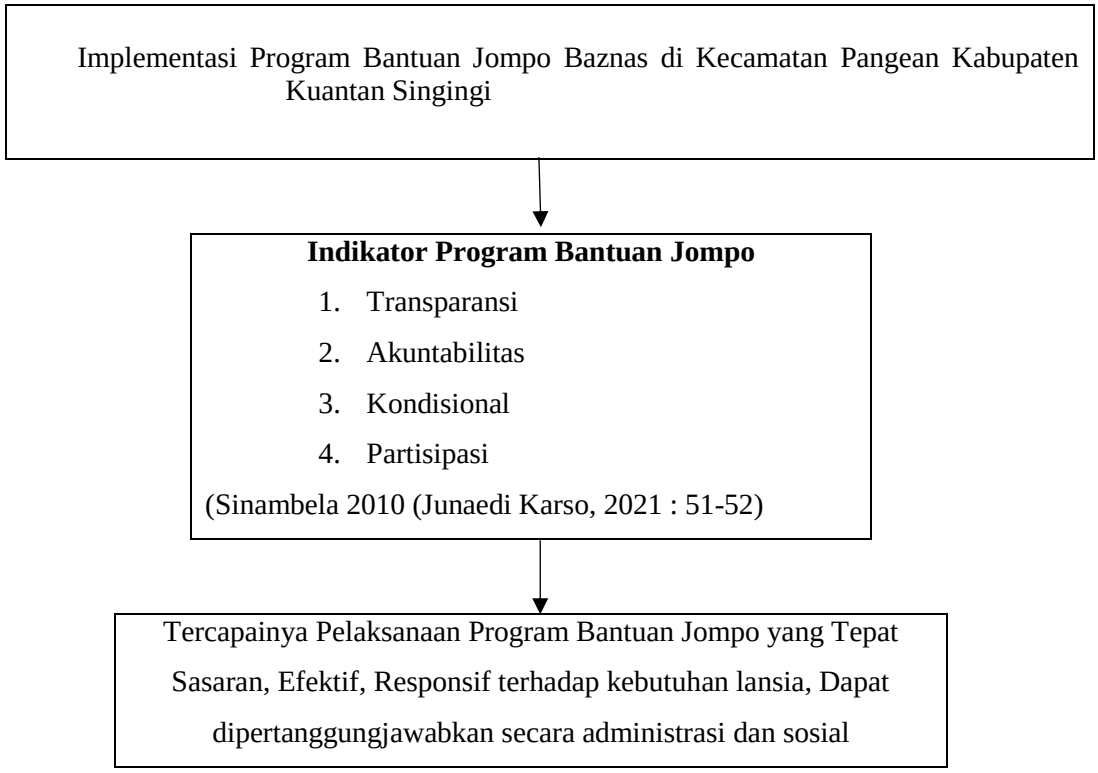

Sumber : Modifikasi Penelitian 2026

2.3 Hipotesis

Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa implementasi program bantuan jompo di Kecamatan Pangean belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Dugaan ini muncul karena terdapat berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan program, seperti mekanisme penyaluran bantuan yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya koordinasi antar pihak terkait seperti pemerintah kecamatan, desa, dan petugas sosial.

Selain itu, tingkat pemahaman dan partisipasi para lansia serta keluarganya terhadap program bantuan juga diduga turut memengaruhi keberhasilan program tersebut. Dukungan anggaran yang terbatas dan sistem pendataan yang belum sepenuhnya akurat juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi program ini.

Asumsi-asumsi tersebut akan ditelusuri dan dikaji lebih lanjut melalui metode kualitatif untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai bagaimana implementasi program bantuan jompo dijalankan di lapangan serta faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambatnya.

2.4 Definisi Operasional

1. Pelaksanaan kebijakan (program implementation) diartikan sebagai derajat keterlaksanaan kebijakan di lapangan, dilihat dari pemenuhan standar dan sasaran kebijakan, efektivitas komunikasi, penggunaan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.
2. Implementor atau pelaksana: individu atau organisasi yang bertugas menerjemahkan kebijakan menjadi aktivitas konkret.
3. Sasaran kebijakan: target outcome yang diinginkan, misalnya kelompok penerima manfaat program sosial.

2.4.1 Transparansi

Transparansi yakni pelayanan bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta mudah dimengerti. (dalam Junaedi Karso, 2021).

2.4.2 Akuntabilitas

Yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (dalam Junaedi Karso, 2021).

2.4.3 Kondisional

Kondisional, yakni pelayanan yang dapat sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. (dalam Junaedi Karso, 2021).

2.4.4 Partisipasi

Transparansi yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. . (dalam Junaedi Karso, 2021).

2.5 Operasional Variabel

Tabel 2.1 : Operasional Variabel Implementasi Program Bantuan Jompo Basnaz di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penillaian
Analisis	Program	1.Transparansi	a. Keterbukaan informasi bantuan.
			b. Sosialisasi program.
		2.Akuntabilitas	a. Pertanggungjawaban pelaksana.
			b. Pelaporan penggunaan bantuan
		3.Kondisional	a. Ketepatan sasaran penerima.
			b. Penyesuaian dengan kondisi lokal
		4.Partisipasi	a. Keterlibatan masyarakat.
			b. Usulan dan masukan masyarakat

Sumber : Modifikasi Penelitian 2026

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data sebagaimana adanya tanpa melakukan manipulasi, modifikasi, atau perlakuan terhadap variabel penelitian. (Sugiyono, 2016).

Penelitian Kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang individu atau kelompok yang terlibat dalam situasi tersebut. (Syam et al., 2025).

3.2 Informan

Tabel 3.1 : Informan Implementasi Program Bantuan Jompo Baznas di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

No	**Informan**	**Jumlah orang**	**Persentase**
1	UPZ Kecamatan Pangean	3	27%
2	Kepala Desa	3	27%
3	Penerima Bantuan	5	46%
Jumlah		11	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian 2026

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive , yang berarti bahwa informan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria atau ciri-ciri khusus yang sesuai dan memiliki kompetensi untuk memberikan informasi terkait dengan data-data penelitian ini.

Menurut Holloway & Wheeler, (2022) menyebutksn sampling adalah pemilihan suatu elemen yang disengaja dari seluruh populasi untuk memperoleh pengetahuan dan informasi.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer yang diperoleh dari para informan tersebut digunakan untuk menggali secara mendalam bagaimana program bantuan jompo BAZNAS diimplementasikan, mulai dari tahap perencanaan, pendataan, verifikasi, penyaluran, hingga evaluasi. Data primer ini juga menjadi dasar untuk menganalisis faktor pendukung, faktor penghambat, serta tingkat efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan lansia jompo di Kecamatan Pangean.

3.3.2 Data Sekunder

Data yang diperoleh dari laporan tertulis berupa data informasi dari aparatur pada Baznas baik berupa data base, terkait Program Bantuan Jompo, dan laporan lain yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

3.4 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada Implementasi Program Bantuan Jompo Baznas di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

3.5 Lokasi Penelitian

Adapun Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ,kode pos 29553

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan Sugiyono,

(2019). Untuk menjawab permasalahan penelitian yang tepat dan akurat, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.6.1 Observasi

Merupakan metode pengumpulan data penelitian berkenaan dengan perilaku manausia, proses kerja, gejala-gejala dalam dan bila reponden yang di amati tidak terlalu besar. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menentukan fakta-fakta di laapangan. (Sugiyono, 2019).

3.6.2 Wawancara

Wawncara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden yang sedikit. (Sugiyono, 2019).

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, traskip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. (Sandu Siyono, 2016).

3.6.4 Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh peneliti melalui kegiatan pengumpulan data tidak diterima begitu saja dsn dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda misalnya data diperoleh dengan teknik wawancara lalu di cek dengan observasi atau dokumentasi.(Bachtiar, 2021)

3.7 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2019)

3.7.1 *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data yaitu dilakukan dengan memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang serta mengesampingkan data yang tidak relevan. Reduksi data berarti membuat rangkuman memilih tema, membuat kategori dan pola terentu sehingga memiliki makna.reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memiliki, memfokuskan, membuat dan menyusun data ke arah pengambilan keputusan. (Umrati & Wijaya, 2020).

3.7.2 *Data Display* (Penyajian Data)

Display data merupakan proses penyajian data setelah dilakuka reduksi data. Data yang disajikan perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu seperti uraian konsep kategori, dan lain-lain sehingga mudah di pahami pembaca.(Umrati & Wijaya, 2020)

3.7.3 *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan yang di ambil masih bersifat sementara sehingga dapat berubah setiap saat apabila tidak didukung bukti-bukti yang kuat tetapi apabila kesimpulan yang telah di ambil di dukung dengan bukti-bukti yang konsisten. (Umrati Hengki Wijaya, 2020)

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian Implementasi Program Bantuan Jompo Baznas Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2025-2026																							
		Juli/Agustus				September /oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal		X																						
2	Pembuatan Proposal					X	X			X															
3	Bimbingan Proposal										X			X	X	X		X	X	X					
4	Seminar Proposal																								
5	Revisi Proposal																								
6	Pembuatan Skripsi																								
7	Bimbingan Skripsi																								
8	Sidang Skiripsi																								
9	Revisi Skripsi																								

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2025.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

4.1.1 Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kuantan Singingi berdiri pada tahun 2001. Dua Tahun setelah pemekaran Kabupaten Kuantan Singingi dari Kabupaten Indragiri Hulu. BAZ Kabupaten Kuantan Singingi Berdiri pada tanggal 2 maret 2001 dipimpin oleh seorang ketua yaitu Ir. Mahdili dengan pekerja BAZ beranggotakan 17 orang.

Pada tahun pertama bediri, Bupati Kuantan Singingi Drs. H. Asrul Ja'far bekerjasama dengan Kantor Depertemen Agama Kementrian Agama yang dikepalai oleh H. Masran Ali, S.Ag. Sasaran Muzakki pada saat itu ialah PNS yang langsung dipotong gajinya melalui bendahara Dinas, Instansi, dan Kantor di Lingkungan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Himbauan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 218 Tahun 2001 bagi PNS yang bergaji diatas Rp 2.000.000, dihimbau untuk menunaikan zakat. Belum banyak yang terkumpul pada saat itu dan program BAZ baru sebatas pada bantuan Konsumtif untuk fakir miskin dan beasiswa untuk siswa miskin disekolah dan Madrasah.

Periode kedua tahun 2004 sampai 2007 struktur kepengurusan diganti, ketua dipercayakan kepada Drs. H. Chaidir Arifin sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah, dari segi penerimaan sedikit meningkat karena sosialisasi selain kepada PNS, Kepada masyarakat mulai diprogramkan.

Periode ketiga pada tahun 2007 sampai 2010 perkembangan semakin pesat dari segi pengumpulan dan beberapa program kerja dan kegiatan juga ditingkatkan dengan meluncurkan program Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan memberikan modal usaha agar pedagang kecil dapat berkembang dan terlepas dari jeratan rentenir di pasar tradisional. Namun program tersebut tidak dapat berjalan sesuai harapan, karena para paham agama Islam berpendapat bahwa dana zakat tidak untuk simpan pinjam kepada mustahik tetapi sebagai bantuan dan tidak untuk dikembalikan.

Pada periode keempat tahun 2010 sampai 2013 kepengurusan kembali diganti dengan ketua Ir. H. Liusman Saleh, MT. Pada masa ini sosialisasi semakin gencar kepada pengusaha dan kontraktor. Hasil pengumpulan naik secara signifikan mencapai angka 3 milyar lebih selama tahun 2011, dan beberapa program dikembangkan disamping melanjutkan program pada kepengurusan sebelumnya ditambah dengan program memberikan pelatihan keterampilan perbengkelan dan usaha jahit, setelah mendapat pembekalan ilmu dan skill diberikan modal untuk membuka usaha sesuai bidang masing-masing, 80% mereka yang dibantu berhasil dan berkembang sampai sekarang dan juga dirancang program bantuan Rumah Layak Huni bagi masyarakat Muslim fakir miskin.

Periode kelima tahun 2013 sampai 2017 dengan ketua masih Ir. H. Liusman Saleh, MT. Beberapa Undang-undang dan Peraturan mengalami perubahan-perubahan dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2011, maka periode ini nama Badan Amil Zakat dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten atau Kota diganti

menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan untuk ditingkat kecamatan diganti dengan sebutan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Memasuki periode kelima kepemimpinan BAZNAS diganti oleh Drs. H. Chaidir Arifin untuk memimpin Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi untuk periode 2017-2021 dan mengalami perubahan Undang-Undang dengan memakai panduan undang-undang baru tahun 2014.

Perkembangan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dengan usianya yang semakin dewasa terlihat semakin berkembang pada tahun 2010 hinga tahun 2013. Pada tahun 2016 berkat pengurus melakukan sosialisasi sampai ke kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dan dalam badan kepengurusan sudah ada tenaga-tenaga yang handal. Ditahun 2017 kepengurusan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pelantikan ulang oleh Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

Pengurus BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tersebut akan berakhir sampai terbentuknya kepengurusan yang baru periode berikutnya. Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang terbentuk tersebut berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 telah terbentuk dengan jumlah kepengurusan 5 orang.

Berdasarkan keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 368 /XII/ 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, pengurus menjalankan tugas mengelola dana zakat selama 5 tahun. Selanjutnya pengurus juga memberikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun. Dalam laporan tersebut telah di tuangkan secara rinci zakat yang dikumpulkan dari para muzakki sekaligus pendistribusiannya kepada mustahik.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah lembaga keagamaan yang mengelola kegiatan pemberdayaan zakat, meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pengembangan zakat. Ketiga kegiatan ini diharapkan dana zakat diberdayakan secara maksimal. Zakat merupakan instrument yang akan membantu ekonomi umat, sebagai pemutus kesenjangan sosial antara orang yang ekonominya baik dengan orang yang ekonominya buruk. Hal seperti inilah yang menjadi acuan penting dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.

4.1.2 VISI dan MISI BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

4.1.2.1 Visi " Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat"

4.1.2.2 Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi :

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) secara masif dan terukur
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan

5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
8. Meningkatkan sinergi dan kaloborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional dan
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

4.1.3 Sistem Operasional BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

4.1.3.1 Pengumpulan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan singingi dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1. Penyetoran atau transfer ke rekening Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi di Bank Riau Syari'ah cabang pembantu Teluk Kuantan nomor rekening : 825-11 00001 An. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dan rekening Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi di Bank Syari'ah Mandiri Teluk Kuantan Nomor Rekening : 450-000-9999 An. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi
2. Pembayaran Zakat Melalui Counter Zakat atau kepada Amil di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Layanan jemput zakat

4.1.3.2 Program Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi setelah mengumpulkan zakat, dana zakat yang terkumpul wajib disalurkan atau distribusikan kepada orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Program-program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi setiap tahunnya disalurkan sesuai asnaf yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dan beberapa program pendistribusian penyaluran dana zakat yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu diantaranya :

1. Program Bidang Pendidikan (Kuansing Cerdas) Penyaluran zakat untuk program pendidikan disalurkan kepada para siswa yang memiliki keluarga tergolong miskin untuk tingkatan :
   a. Siswa Sekolah Dasar Sederajat
   b. Siswa Sekolah Menengah Sederajat
   c. Siswa Sekolah Menengah Atas Sederajat
   d. Mahasiswa yang sedang melakukan Penelitian (tugas Akhir)
   e. Mahasiswa yang melanjutkan pendidikan keluar Negeri seperti ke Mesir, Marako, Sudan, dll

Adapun sasaran dalam penyaluran program pendidikan ini untuk menciptakan kuansing cerdas, sehingga bagi anak-anak didik

SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA di Kabupaten Kuantan Singingi yang kurang mampu orang tuanya maka pada tahun ajaran baru diberikan bantuan untuk membantu biaya anak pada tahun ajaran baru yang cukup besar. Bagi mahasiswa/mahasiswi yang kesulitan biaya dalam penyelesaian penelitian (tugas akhir), serta putra putri Kabupaten Kuantan Singingi yang akan melanjutkan pendidikan keluar Negeri juga dibantu biaya transportasinya.

4.1.3.3 Program Bidang Kesehatan (Kuansing Sehat)

Penyaluran zakat untuk program bidang kesehatan disalurkan dengan cara :

a. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan untuk membantu meringankan biaya bagi masyarakat yang tergolong miskin yang sakit dan berobat ke RSUD Teluk Kuantan.
b. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menyalurkan secara insidentil, jika ada masyarakt yang memberikan permohonan untuk biaya berobat maka Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi memberikan ongkos kepada mustahik jika sudah termasuk kepada BPJS
c. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melaukukan kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi untuk membiayai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Adapun sasaran dalam penyaluran program bidang kesehatan ini untuk menciptakan kuansing sehat, sehingga tidak ada masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi yang beragama Islam yang tergolong kedalam keluarga tidak mampu yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, karena pelayanan kesehatan merupakan hak dari seluruh rakyat Indonesia

4.1.3.4 Program Bidang Kemanusiaan (Kuansing Makmur) Penyaluran zakat untuk program bidang kesehatan disalurkan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

a. Penyaluran untuk fakir jompo yang diberikan bantuan berkelanjutan sepanjang usia, dengan penyaluran satu kali per triwulan.
b. Pembuatan rumah layak huni untuk masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak.
c. Penyaluran untuk masyarakat yang mendapat musibah.
d. Penyaluran konsumtif ramadhan pada bulan ramadhan.

Adapun sasaran dalam penyaluran program kemanusiaan ini untuk menciptakan kuansing Makmur, sehingga dengan program kemanusiaan ini akan mengurangi kesenjangan sosial, program kemanusiaan ini ingin mewujudkan tidak ada lagi masyarakat Kuantan Singingi yang tinggal dirumah yang tidak layak, tidak ada orang-orang jompo yang terabaikan.

4.1.3.5 Program Bidang Ekonomi (Kuansing Sejahtera)

a. Pemberian bantuan modal usaha bagi mustahik yang memiliki potensi kemampuan dalam berusaha yang tidak mempunyai modal.
b. Memberikan pelatihan kepada mustahik yang belum mempunyai skill, sehingga terbukanya lapangan kerja.

Adapun sasaran dalam penyaluran program ekonomi ini untuk menciptakan kuansing sejahtera, sehingga dengan adanya program ekonomi ini perekonomian umat Islam tidak terjadi kesenjangan terlalu jauh, ketika adanya masyarakat Kabupaten Kuantan Singing yang kekurangan modal dalam usahanya, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi hadir dengan program ekonomi, ketika angka pengangguran yang tinggi, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi hadir dengan memberikan pelatihan usaha, setelah dilakukan pelatihan, dilanjutkan dengan pemberian modal untuk modal awal terhadap mustahik yang diberikan pelatihan.

4.1.3.6 Program Bidang Dakwah dan Advokasi (Kuansing Taqwa)

a. Pemberian bantuan kepada panti asuhan.
b. Pemberian pembinaan bagi muallaf yang masih lemah keimanannya.
c. Pemberian bantuan kepada para qari/qari'ah.
d. Operasional pondok tahfiz BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun sasaran dalam penyaluran program Dakwah dan Advokasi ini untuk menciptakan kuansing Taqwa. Dalam program

dakwah dan advokasi ini Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi berupaya untuk membentuk masyarakat untuk semakin Taqwa kepada Allah SWT sehingga diberikan pembinaan terhadap mu'allaf, terhadap qari/qari'ah dan pembentukan pondok tahfiz Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dalam mewujudkan hafiz di Kabupaten Kuantan Singingi.

4.1.4 Struktur Organisasi Baznas Kuantan Singingi

Struktur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi untuk masa bakti saat ini 2024-2029 terdiri dari lima pejabat utama. Lembaga ini dipimpin oleh **Syafriadi, SHI., M.H.** sebagai Ketua.

Berikut adalah susunan lengkap pimpinan BAZNAS Kuantan Singingi:

- **Ketua**: Syafriadi, SHI., M.H.
- **Wakil Ketua I**: Ir. Emil Harda, MM., MBA
- **Wakil Ketua II**: Zubirman, SH
- **Wakil Ketua III**: Gustaf Kasibes, S.Ag
- **Wakil Ketua IV**: Darmawan

Struktur Organisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Keamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi :

- Ketua UPZ Pangean : Aswandi selaku
- Sekretaris UPZ Pangean : Owesin Hower selaku
- Bendahara UPZ Pangean : Kasmaidi Ahmad

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat simpulkan bahwa tingkat Implementasi Program Bantuan Jompo Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik. Hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara dengan informan di lapangan yang menunjukkan baiknya Implementasi Program Bantuan Jompo Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, hanya saja karena keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua lansia jompo dapat terakomodir oleh program bantuan Jompo Baznas ini.

6.2 Saran

Berdasar kan kesimpulan diatas di ajukan saran sebagai berikut :

6.2.1 Diharapkan kepada semua orang dapat menunaikan kewajiban berzakat mealui Baznas.

6.2.2 Di harapkan pihak Baznas lebih banyak memberikan sejumlah dana agar jompo-jompo yang layak di pangean bisa terkomodir melalui program bantuan jompo ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ambarwati, A. (2018a). Peran kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, *5*(1), 12–25.

Ambarwati, A. (2018b). Studi tentang perilaku organisasi dalam meningkatkan efektivitas kerja. *Jurnal Administrasi*.

Andri, A., & Siregar, M. H. (2021). *Keuangan Negara & Daerah*. Rajawali Pers.

Bachtiar, M. (2021). *Teknik triangulasi dalam penelitian kualitatif*.

Congge, U. (2017). Administrasi negara dalam perspektif ilmu politik modern. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Endrawati, T. (2023). Peran struktur organisasi dalam peningkatan kinerja lembaga publik. *Jurnal Administrasi Publik*.

Fauzi, & Hidayat. (2022). Evaluasi efektivitas kebijakan publik dalam pengelolaan zakat produktif. *Jurnal Ekonomi Syariah*, *10*(1), 55–67.

Gilbert's later work frames productive welfare as an enabling-state approach that situates welfare within market-oriented reform and broader comparative welfare-state change

Lestari (2022) . Manajemen zakat modern"

Handoko, T. H. (2022). *Manajemen dan Organisasi*. Alfabeta.

Hill, M., & Hupe, P. (2019). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance*. Sage Publications.

Holloway, & Wheeler. (2022). *Qualitative research in nursing and healthcare*. Wiley-Blackwell.

IFSB, & BAZNAS. (2018). *Zakat Core Principles (ZCP): Guidance for effective zakat management and governance*. Islamic Financial Services Board.

Irmayani, N. W. D. (2021). Manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Bali. *Jurnal Administrasi Publik*, *11*(2), 90–104.

Karso, J. (2021). Pengaruh etika birokrasi terhadap kualitas pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, *9*(2), 65–80.

Midgley, J. (2019). *Social development: Theory and practice*. Sage Publications.

Muhammad. (2019). *Etika bisnis Islam*. Salemba Empat.

Nurasiah, S. (2022). Program Cinta Lansia BAZNAS, UIN Bandung.

Nurhasanah. (2019). Pengaruh budaya organisasi dan kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada instansi pemerintahan. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, *10*(2), 87–98.

Ode, H. (2019). Pengantar organisasi dan manajemen publik. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*.

Pasolong, H. (2020). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.

Peterson, S. A. (2023). *Public finance and economic growth in developing countries*. Routledge.

Purnaya, G. K. (2020). *Manajemen sumber daya manusia dalam organisasi publik*. Udayana University Press.

Qardhawi, Y. (2019). *Fiqh al-Zakat*. Scientific Publishing Centre.

Rahman, M. (2017). Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai sektor publik. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen*, *6*(1), 33–44.

Saetren, H. (2020). Implementing the third generation of implementation research: Revisiting Pressman and Wildavsky's implementation research. *Public Policy and Administration*, *35*(4), 401–424.

Saihudin. (2019). Implementasi kebijakan publik dalam pelayanan sosial di daerah. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, *23*(3), 233–245.

Sedarmayanti. (2021). *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*. Refika Aditama.

Sedarmayanti. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju.

Setiawan, A. A. (2025). Analisis Penerapan Teori Organisasi dalam Organisasi Modern: Studi Kasus pada BPJS Kesehatan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, *2*(5), 363–369.

Siagian, S. P. (2021). *Administrasi dan Birokrasi*. Bumi Aksara.

Siyono, S. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif*. Penerbit Andi.

Spicker, P. (2020). *Social policy: Theory and practice*. Policy Press.

Suharto, E. (2019). Menengok kriteria kemiskinan di Indonesia: Menimbang indikator kemiskinan berbasis hak. JUrnal analisis sosial, 31-39.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , dan R&D*. PT Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Syam, E., Rizhan, A., & Desriadi. (2025). *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian: Untuk Peneliti Pemula*. CV Bintang Semesta Media.

Tangkilisan, H. (2020). *Ilmu Administrasi Negara*. Gava Media.

Terry, & George. (2018). *Dasar-Dasar Manajemen*. PT. Bumi Aksara.

Umrati, & Wijaya, H. (2020). *Analisis data dalam penelitian kualitatif*. Penerbit Aksara.

Wibowo, E. (2023). Transformasi Model Organisasi Pemerintahan Menuju Collaborative Governance. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, *9*(1), 45–59.

Winter, S. C. (2017). Implementation perspectives: Status and reconsideration. In *The Sage handbook of public administration* (pp. 265–288). Sage.

Yusuf, R. M., & Syarif, D. (2018). Pengaruh motivasi dan kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, *9*(1), 34–45.

Dokumentasi























YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl.Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR :061 /Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Menimbang :
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, tekhnolo gi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

Memperhatikan : Berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Ahkhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menunjuk :

a. Pembimbing I : Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
NIDN : 1030058402
b. Pembimbing II : Emilia Emharis, S.Sos., M.Si
NIDN : 1002059002

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :
Nama : Risa Lestari
NPM : 220411076
Judul Skripsi : Implementasi Program Bangtuan Jompo di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 11 Agustus 2025
Dekan,

RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

Tembusan :

UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
KECAMATAN PANGEAN

Sekretariat : Kantor Camat Pangean Kab. Kuantan Singingi
Jalan Jenderal Sudirman No..... KodePos 29561

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Pangean, 24 Juni 2026

Nomor : 070/UPZ-PGN/
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Laporan Pelaksanaan Riset**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi
di-
Teluk Kuantan

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi nomor : 137/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2026 tanggal 30 April 2026 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, maka Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	Risa Lestari
NPM	:	220411076
Fakultas	:	Ilmu Sosial
Program Studi	:	S1 Administrasi Negara
Semester	:	VIII (Delapan)
Judul Penelitian	:	Implemetasi Program Bantuan Jompo Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi
Lokasi Penelitian	:	Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Bahwa yang bersangkutan:

1. Dalam Pelaksanaan kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset dan pengumpulan data ini.
2. Telah melakukan riset dan pengumpulan data ini selama 3 (bulan) bulan (Mei-Juli 2026).
3. Hasil riset dan pengumpulan data harus dilaporkan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

UPZ Kecamatan Pangean,

ASWANDI, S.Pd., MM
Ketua

PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JL. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail. Unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : RISA LESTARI

NPM : 220411076

DOSEN PEMBIMBING : *Pembimbing 1. Rika Ramadhanti, S.Sos.,M.Si*

2. Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si

JUDUL : IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN JOMPO BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNas) DI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Mulai Bimbingan

NO	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
		Tambahkan Lampiran			
	3/07-26	tambah Analisa pada setiap	RR		
		Indikator			
	13/07-26	Perbaiki Referensi	RR		

		Perbaiki bab V	Rp.		
	20/02/2026	Pembahasan tolong di buat 5.3.	Rp.		

Form 12

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07Kebun Nenas Jake Telp.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Risa Lestari

NPM : 220411076

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Implementasi Pogram Bantuan Jompo BAZNAS di Kecanatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Hari/Tgl Ujian : Kamis / 12 Februari 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

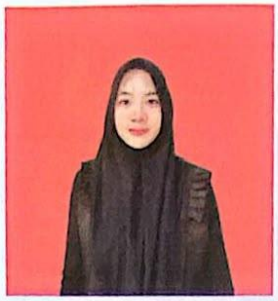

Nama	: Risa Lestari
Tempat/Tanggal Lahir	: Tembilahan/05 Maret 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status	: Belum Nikah
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Alamat	: Sako, Pangean
Alamat Email	: Risalestari605@gmail.com
Pendidikan	: 1. Tahun 2015 LULUS SD Negeri 016 Sako
	2. Tahun 2018 LULUS Mts Negeri 1 Kuansing
	3. Tahun 2021 LULUS SMA Negeri 1 Pangean

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 30 Agustus 2025

Penulis

RISA LESTARI
NPM.220411076